

The Influence Of Public Participation And Enviromental Ethics In Sustainable Development

Oleh :

Ristiana – 14010112130075

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In the theoretically, public has a strategic role in the development process. This community has the right and the obligation to participate in the development process. Public participation in sustainable development is set out in law No. 32 years 2009 about the environment have explained about the obligation, right and prohibition restriction outlined in section 65. In the article described that the public given space to participate in managing the environment. The public reserves the right reject or accept all the activities related to the environment. The public has the right to file an objection when construction is done negatively affect the living environment of the public.

Research method used are mix method, namely the merger between quantitative methods and qualitatif method. Quantitative methods as main methods and quantitative methods as a method of supporting research that can not be explained through quantitative. Research conducted at Tembalang by taking the sendangguwo village and tembalang village as research sample. Research instrument using a detailed questionnaire with 68 respondent and interview to related parties.

The result of such research is the influence that low public participation and sustainable development. That is because the public is till tied to the government in the process of sustainable development. Enviromental ethics provide a pretty strong influence to sustainable development. It is because the government together with the public should really pay attention to the envoronment so that the construction can be done in a sustainabe way without reducing the quality of the environment.

The advice given is to make government more angaging the public in the process of sustainable development and the goverment togethet with the public should pay more attention to the environment in every development in order not to reduce the quality of the environment.

Key : Influence, Public Participation, enviromental ethic and sustainable development

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN ETIKA LINGKUNGAN
TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
STUDI KASUS : KECAMATAN TEMBALANG**

ABSTRAK

Secara teoritis masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan. Hal tersebut membuat masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat berupa ide, uang maupun material. Dalam Undang – undang No 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup telah menjelaskan tentang Hak, Kewajiban dan Larangan yang dijabarkan pada pasal 65. Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk turut berpartisipasi dalam mengelola lingkungan hidup. Dimana masyarakat berhak untuk menolak ataupun menerima segala kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sesuai dalam undang – undang tersebut, masyarakat semestinya berhak mengajukan keberatan ketika pembangunan yang dilakukan berdampak negatif pada lingkungan hidup masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah mix method yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dimana yang menjadi metode utama adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif adalah metode pendukung penelitian yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tembalang dengan mengambil dua kelurahan yaitu Kelurahan Sendangguwo dan Kelurahan Tembalang sebagai sample penelitian. Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner dengan jumlah sampel 68 responden dan melalui wawancara kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dari pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tembalang adalah adanya pengaruh yang rendah antara partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan berupa material, tenaga maupun pikiran tidak mampu sepenuhnya menyukseskan proses berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan masih sangat bergantung kepada Pemerintah sehingga masyarakat tidak mampu berdiri sendiri untuk melaksanakan pembangunan. Sedangkan etika lingkungan memberikan pengaruh cukup kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut karena dalam proses pembangunan, pemerintah bersama – sama masyarakat harus benar – benar memperhatikan kondisi

lingkungan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas lingkungan yang ada.

Saran yang diberikan kepada pemerintah adalah agar pemerintah lebih melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pemerintah bersama masyarakat harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan dalam setiap pembangunan agar tidak mengurangi kualitas lingkungan.

Kunci : Partisipasi Masyarakat, Etika Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Secara teoritis masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan. Hal tersebut membuat masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat berupa ide, uang maupun material.

Arnstein (1969) menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (*citizen participation is citizen power*). Menurut Arnstein partisipasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh.

Dalam Undang – undang No 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup telah menjelaskan tentang Hak, Kewajiban dan Larangan yang dijabarkan pada pasal 65. Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk turut berpartisipasi dalam mengelola lingkungan hidup. Dimana masyarakat berhak untuk menolak ataupun menerima segala kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sesuai dalam undang – undang tersebut, masyarakat semestinya berhak mengajukan keberatan ketika pembangunan yang dilakukan berdampak negatif pada lingkungan hidup masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi juga merupakan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menghabiskan modal alam. Namun pada kenyataannya, alih fungsi lahan yang gencar dilakukan di Indonesia sebagai alat pembangunan seperti perumahan, industri dan perdagangan banyak dilakukan secara sembarangan. Bukit – bukit serta lahan resapan air sudah banyak berganti menjadi perumahan serta gedung – gedung. Selain itu, ruang – ruang tanah di tepi jalan juga sudah beralih fungsi menjadi tempat perdagangan. Fenomena – fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dibanding kualitas lingkungan hidup yang ada. Pembangunan berkelanjutan yang semestinya bisa berjalan

seimbang antara kebutuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan pada kenyataannya masih susah diwujudkan. Semakin berkembangnya jaman menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia yang berdampak pada dikorbankannya ruang – ruang lingkungan hidup. Apabila fenomena ini terus berlanjut tanpa ada tekanan dari pemerintah maka dipastikan generasi yang akan datang akan semakin sulit dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan diperlukan etika lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan yang dominan di dalam penelitian ini dan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan pendukung yang melengkapi hasil dari penelitian ini.

Pendekatan kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena social. Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika induktif.¹

Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pembangunan keberlanjutan dengan cara survey sehingga dapat menghasilkan data yang obyektif terhadap fenomena social yang terjadi di Kecamatan Tembalang utamanya di Kelurahan Tembalang.

Penelitian ini mengambil dua Kelurahan sebagai sampel yaitu Kelurahan Sendangguwo dan Kelurahan Tembalang dengan jumlah sampel adalah 68 orang.

3. PEMBAHASAN

¹ <http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kualitatif.html>
diakses pada tanggal 15 Juni 2015

A. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Tembalang

Tabel I
Tabel Uji Korelasi Y dengan X1

		RX1	RY
X1	Pearson Correlation	1	.317**
	Sig. (1-tailed)		.004
	N	68	68
RY	Pearson Correlation	.317**	1
	Sig. (1-tailed)	.004	
	N	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa nilai $r = 0.317$. Artinya hubungan antara X1 yaitu partisipasi masyarakat dengan Y yaitu Pembangunan Berkelanjutan adalah 0,317. Hal ini menunjukkan hubungan yang rendah antara partisipasi masyarakat dengan etika lingkungan.

Dari hasil korelasi tersebut, dapat diketahui sumbangan variabel X adalah sebesar :

$$KP = r^2 \times 100\% = 0.317^2 \times 100\% = 10\%$$

Sumbangan 10% variabel Y dijelaskan oleh variabel X1. Sisanya 90% ditentukan oleh variabel lain.

Kesimpulan :

Ada hubungan yang signifikan antara partisipasi masyarakat sebagai variabel X1 dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Y.

B. Pengaruh Etika Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 2

Tabel Korelasi Variabel Y dengan X2

		RY	RX2
RY	Pearson Correlation	1	.456**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	68	68
RX2	Pearson Correlation	.456**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa nilai $r = 0.456$. Artinya hubungan antara X2 yaitu pasrtisipasi masyarakat dengan Y yaitu Pembangunan Berkelanjutan adalah 0,456. Hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel X2 dengan Y. Dari hasil korelasi tersebut, dapat diketahui sumbangan variabel X adalah sebesar :

$$KP = r^2 \times 100\% = 0.456^2 \times 100\% = 20,7\%$$

Sumbangan 20,7% variabel Y yaitu pembangunan berkelanjutan dijelaskan oleh variabel X2 yaitu etika lingkungan. Sisanya 79.3% ditentukan oleh variabel lain.

Kesimpulan :

Ada hubungan yang signifikan antara etika lingkungan sebagai X2 dan pembangunan berkelanjutan sebagai Y.

C. Partisipasi Masyarakat dan Etika Lingkungan Bersama – Sama Mempunyai Pengaruh Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 3
 Hasil Uji Regresi Berganda
 Variabel X1 dan X2 terhadap Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.522 ^a	.273	.250	.50703

a. Predictors: (Constant), RX1, RX2

b. Dependent Variable: RY

Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y.

Besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y dapat diketahui dengan melihat nilai $R^2 = 0.273 = 27.3\%$.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 27.3% dan besarnya variabel lain yang memengaruhi variabel Y di luar kasus ini adalah 72.7%.

D. Bentuk Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Tembalang

Dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang Tahun 2010-2030 pembagian BWK ditetapkan Tembalang berada pada BWK VI dengan luas kurang lebih 4.420 Ha. Rencana pendistribusian fasilitas pelayanan regional pada BWK VI tepatnya di Kecamatan Tembalang dipusatkan untuk pendidikan hal tersebut dikarenakan terbangunnya beberapa universitas negeri maupun swasta di wilayah Kecamatan Tembalang.

Dalam konstelasi regional kawasan Tembalang merupakan salah satu kawasan pemekaran kota sebagai pusat pengembangan tanah pemukiman penduduk Semarang guna meringankan tekanan penduduk di dalam wilayah kota. Fungsi pelayanan kota pada BWK VI pada kenyataannya tersebar dan

berkembang, pada beberapa daerah merupakan kawasan khusus seperti kawasan pendidikan tinggi dan kawasan konservasi.

Beberapa daerah merupakan kawasan khusus yaitu :

- a. Kawasan Pendidikan, merupakan pusat Pendidikan Tinggi yaitu di Kelurahan Tembalang yang terdiri Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang dan Akademi Perawat Departemen Kesehatan.
- b. Kawasan Konservasi berada pada daerah benturan sungai dan perbukitan dengan kemiringan tinggi seperti kelurahan Mangunharjo dan Meteseh
- c. Kawasan Pemukiman merupakan wilayah yang sebagian besar adalah pemukiman warga seperti Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Sendangmulyo dan Kelurahan Kedungmundu.

Untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang antara infrastruktur dan lingkungan maka dalam Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 diatur ruang – ruang yang akan dibangun sebagai infrastruktur dan lingkungan hidup.

Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK VI meliputi :

- a. Pusat lingkungan VI.1 terdapat di Kelurahan Bulusan dengan daerah pelayanan Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;
- b. Pusat lingkungan VI.2 terdapat di Kelurahan Sendangmulyo dengan daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu; dan
- c. Pusat lingkungan VI.3 terdapat di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli.

Hasil Penelitian perwujudan pembangunan berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa sebagai daerah pengembangan di Kota Semarang Kecamatan Tembalang masuk kedalam BWK VI dimana difokuskan untuk wilayah pendidikan. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa berdasarkan kebijakan dan strategi tata guna lahan BWK VI Tembalang dapat dikembangkan sebagai wilayah kegiatan perkotaan dengan mengoptimalkan ketersediaan lahan.

Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Sekretaris Camat Tembalang bahwa pembangunan di wilayah Tembalang dilakukan dengan mengoptimalkan ketersediaan lahan yang ada tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.

Selain itu adanya Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 diatur ruang – ruang yang akan dibangun sebagai infrastruktur dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tembalang sesuai dengan pokok – pokok kebijaksanaan pembangunan (Emil Salim, 1990) bahwa pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Dengan mengindahkan kondisi lingkungan maka setiap daerah yang dibangun harus sesuai dengan zona peruntukannya. Hal tersebut memerlukan RTRW, sehingga diharapkan akan dapat menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Hal tersebut terwujud dengan difokuskannya Kecamatan Tembalang sebagai pusat pendidikan sesuai dengan RTRW Kota Semarang yang menunjukkan pengoptimalan sumber daya manusia melalui pendidikan selain itu untuk menunjang hal terwujudnya Kecamatan Tembalang sebagai salah satu pusat pendidikan di Kecamatan Tembalang adalah dengan dibangunnya infrastruktur pendukung seperti perumahan, namun hal tersebut juga diimbangi dengan dibangunnya kawasan konservasi sebagai penyeimbang antara kemajuan infrastruktur dengan lingkungan.

E. Bentuk Perwujudan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan juga sudah diatur dalam Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 dalam Pasal 160 ayat 1 – 3 yang berisi tentang :

1. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
3. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian tentang perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tembalang adalah sebagai berikut.

Berkaitan tentang perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah bahwa masyarakat berkontribusi secara sukarela terhadap pembangunan yang terjadi di lingkungan mereka hal tersebut dibuktikan dengan hasil survey tentang ketersediaan masyarakat untuk memberika materi berupa uang, tenaga, maupun pemikiran untuk keberlangsungan pembangunan.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam di dalam landasan teori bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang ditentukan oleh dirinya sendiri Mikkelsen (1999 : 64). Hasil penelitian tentang bentuk perwujudan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tembalang pada dasarnya sudah berkontribusi secara sukarela walaupun dalam jumlah yang kecil, kontribusi tersebut sudah menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pengertian tentang partisipasi yang dijelaskan oleh Mikkelsen (1999 : 64) bahwa partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini terbantahkan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam subbab ini bahwa pada dasarnya bentuk pembangunan yang ada dilingkungan masyarakat adalah hasil dari pemikiran masyarakat tingkat terendah yaitu melalui rembug RT hingga sampai kepada Pemerintah Kota melalui musrembang. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam landasan teori bahwa proses perencanaan diwujudkan dalam musyawarah, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholder). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat negara, masyarakat, rohaniwan, organisasi – organisasi non pemerintah.

Proses rencana pembangunan di Kecamatan tembalang juga sesuai dengan perencanaan bottom up yang telah dijelaskan di dalam landasan teori bahwa pendekatan perencanaan dimulai dari tingkatan hirarkis yang paling rendan menuju ke atas.

Namun hasil penelitian melalui metode kuantitatif yang mengukur seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang rendah yaitu hanya 10%. Dalam subbab ini yang membahas tentang bentuk perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tembalang telah dijelaskan bahwa kontribusi sukarela masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan di lingkungan tempat tinggal mereka tidak dapat memberikan dampak pembangunan yang besar pula. Bahkan kontribusi tersebut dirasa masih cukup kurang untuk perwujudan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung kepada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya masyarakat tidak akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa campur tangan pemerintah secara menyeluruh.

F. Bentuk Perwujudan Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Tembalang

Hasil penelitian dalam subbab ini yang membahas tentang bentuk perwujudan Etika lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebagai berikut.

Untuk mewujudkan etika lingkungan dalam pembangunan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang, melalui BLH Kota Semarang dibentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), selain itu BLH Kota Semarang juga memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup termasuk di Semarang. Hal tersebut sesuai dengan pokok – pokok kebijaksanaan yang dijelaskan oleh Emil Salim (1990) bahwa proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perlu dikendalikan melalui penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Melalui BLH Kota Semarang, lembaga tersebut juga membahas tentang analisis dampak lingkungan hidup terhadap pembangunan di seluruh Kota Semarang termasuk di Kecamatan Tembalang.

Pada teori etika lingkungan terdapat sembilan prinsip etika lingkungan

(Keraf, 2005 : 143 – 159). Prinsip tersebut yaitu : Sikap hormat terhadap lingkungan, prinsip tanggung jawab, solidaritas, prinsip kasih sayang, prinsip tidak merugikan, prinsip hidup sederhana, prinsip keadilan, prinsip demokrasi dan prinsip integritas sosial. Kesembilan prinsip tersebut telah dijelaskan perwujudannya didalam subbab ini. Sebagian besar masyarakat Tembalang sudah melaksanakan kesembilan prinsip tersebut namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan masyarakat tetap melanggar kesembilan prinsip tersebut dengan melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan seperti masih ada masyarakat yang membakar sampah dan sebagian masyarakat juga tidak mengolah dan memilah sampahnya karena beberapa alasan salah satunya masyarakat tidak mau repot sehingga memilih untuk membakar sampah atau langsung membuang sampah pada tempat pembuangan sampah tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu.

4. Kesimpulan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh rendah terhadap pembangunan berkelanjutan hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya pembangunan adalah hasil aspirasi dari masyarakat namun masyarakat masih sangat bergantung kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan bersifat sukarela dalam artian semampunya masyarakat dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan dan sisanya adalah menjadi bagian dari tugas pemerintah.

Selain itu, hasil dari penelitian ini adalah etika lingkungan berpengaruh secara kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Amanat Lingkungan yang disampaikan oleh Soekarno yang telah dibahas pada landasan teori menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi Indonesia adalah melaksanakan pembangunan tanpa merusak lingkungan karena seiring berkembangnya teknologi, Indonesia akan memasuki tahap industrialisasi secara besar – besaran dimana pembangunan pun akan terus terjadi di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan juga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat, sehingga etika lingkungan masyarakat di

dalam kehidupan sehari – hari sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

5. Saran

1. Pemerintah perlu untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan
2. Perlu diadakannya padat karya dalam pelaksanaan pembangunan, hal tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan pembangunan dapat memperkerjakan masyarakat sekitar sesuai dengan profesinya dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran.
3. Masyarakat lokal perlu mengurangi kegiatan – kegiatan yang berdampak merugikan terhadap lingkungan.
4. Tokoh – Tokoh Lingkungan Hidup perlu lebih merangkul masyarakat untuk bersama – sama melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 2010. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Brata, Suwandi S. *Pembangunan Berkelanjutan*. 1992. Gramedia : Jakarta
- Burnie, David. *Ekologi*. 1999. Erlangga : Jakarta
- Djojoputro, Marsudi. *Teori Lokasi*. 1992. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi
- Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan*. 2002. Jakarta : Kompas
- M, Fachruddin Mangunjaya. *Hidup Harmonis dengan Alam*. 2009. Jakarta : Yayasan Obor Jakarta
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moloeng, J Lexy. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakary.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah*. 2004. Jakarta : LP3ES
- Pamudji. *Ekologi Administrasi Negara*. 1983. Jakarta : Bumi Aksara
- Ramly, Nadjamuddin. *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmoni*. 2005. Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu
- Rohman, Ainur. *Politik, Partisipasi, dan Demokrasi Dalam Pembangunan Program Sekolah Demokrasi*. 2009. Malang : Averroes Community
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. 1986. Jakarta : LP3ES
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. *SPSS vs LISRAEL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. 2011. Jakarta : Salemba Empat

- Setiawan, B. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. 2003. Yogyakarta :
Universitas Gajah Mada
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*. 2007. Jakarta : PT. Raja
Grasindo Persada
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soemarwotto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. 1998. Jakarta :
Djambatan
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Tilaar. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. 2012. Jakarta : Rineka Cipta
- Wirutomo, Paulus. *Sistem Sosial Indonesia*. 2012. Jakarta : Universitas Indonesia
- Yustika, Ahmad Erani. *Pembangunan dan Krisis*. 1992. Jakarta : PT. Grasindo
- Julissar An – Naf. 2015. *Pembangunan Berkelanjutan Relevansinya Untuk
Indonesia*. Jurnal : Madani Edisi II November 2015